

## Lampiran 1 (Foto)



Rapat Koordinasi mengenai menyelaraskan indikator RPJMD dengan indikator SDGs dengan para pemangku kepentingan baik itu pemerintah, akademisi, filantropi, dan LSM/NGO.



Wawancara dengan Bapak Andri Purnomo., S.T.

Waktu Presentasi Tanggal 27 - 28 November 2018

No	NAMA OPD Selasa, 27 November 2018	Waktu
1	Inspektorat Kabupaten Jember; ✓	9:30 - 9:45
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Jember; ✓	9:45 - 10:00
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember; ✓	10:00 - 10:15
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember; <i>beside (10/11)</i>	10:15 - 10:30
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Jember; <i>(blm dibahas)</i>	10:30 - 10:45
6	Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;	10:45 - 11:00
7	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;	11:00 - 11:15
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember; ✓	11:15 - 11:30
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember; ✓	12:00 - 12:15
10	Dinas Sosial Kabupaten Jember; ✓	12:15 - 12:30
11	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember; ✓	12:30 - 12:45
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;	12:45 - 13:00
13	Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Jember;	13:00 - 13:15
14	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jember; ✓	13:15 - 13:30
15	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember; ✓	13:30 - 13:45
16	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember; ✓	13:45 - 14:00
<b>Rabu, 28 November 2018</b>		
17	Bagian Hukum; ✓	9:30 - 9:45
18	Bagian Organisasi; ✓	9:45 - 10:00
19	Bagian Pembangunan; ✓	10:00 - 10:15
20	Sekretariat Dewan;	10:15 - 10:30
21	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember; ✓	10:30 - 10:45
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember; ✓	10:45 - 11:00
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember; ✓	11:00 - 11:15 <i>luindah</i>
24	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember; ✓	11:15 - 11:30 <i>bu erna</i>
25	Dinas Perikanan Kabupaten Jember;	12:00 - 12:15
26	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember; <i>beside (10/11)</i>	12:15 - 12:30
27	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jember; ✓	12:30 - 12:45
28	Bagian Perekonomian;	12:45 - 13:00
29	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember; <i>beside (10/11)</i>	13:00 - 13:15
30	Dinas PU Binamarga dan SDA Kabupaten Jember; ✓	13:15 - 13:30
31	Dinas Perhubungan Kabupaten Jember; ✓	13:30 - 13:45
32	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember; <i>JADI PILIHAN (bnc 29/11)</i>	13:45 - 14:00

5, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41

Kategori 13

5, 8

8, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41

Presensi kehadiran para Organisasi Perangkat Dinas (OPD) Se-Kabupaten Jember.

**Lampiran 2 (Rencana Anggaran)**

**Rencana Anggaran Program Sustainable Development Goal (SDGs)  
Tahun 2018**

URAIAN	JUMLAH (Rp) 2018		JUMLAH (Rp) 2019	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
	Sebelum Perubahan	Setelah perubahan		(Rp)	
<b>Belanja Hibah</b>	68.409.309.100,00	69.745.689.100,00	68.409.309.100,00	1.336.380.000,00	
Belanja Hibah kepada kelompok /anggota masyarakat	68.409.309.101,00	69.745.689.101,00	68.409.309.100,00	1.336.380.000,00	
<b>DINAS PENDIDIKAN</b>			42.144.000.000,00		
<b>Program Pendidikan anak Usia Dini ( BOP PAUD)</b>					
Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) untuk SD/MI			19.774.784.200,00		
Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) untuk SMP/ MTs			10.217.912.000,00		
<b>Program Penuntasan Buta Aksara Pendidikan Keaksaraan Dasar</b>			6.490.524.900,00		
<b>Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman , dan Cipta Karya</b>					
Rumah Tidak Layak Huni					
Pembangunan Jamban					
<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	95.651.872.000,00	147.757.312.057,00		52.105.440.057,00	
Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	95.651.872.001,00	147.757.312.058,00		52.105.440.057,00	

dan/atau keluarga					
<b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau keluarga yang Direncanakan</b>					
<b>Dinas Kesehatan</b>					
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	23.202.790.000,00	45.168.867.157,00		21.966.077.157,00	
<b>Dinas Pendidikan</b>					
Pendidikan Dasar 9 Tahun ( Penyediaan Biaya Operasional Madarasah )/ BPPDGS	14.378.730.000,00	14.378.730.000,00		0,00	
Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Beasiswa S1 /D4/D3	39.600.000.000,00	69.739.362.900,00		30.139.362.900,00	
<b>Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</b>					
Pelayanan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan ( Isbat nikah )	1.580.000.000,00	158.000.000,00		0,00	
<b>Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman , dan Cipta Karya</b>					
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah					
Rumah Tidak Layak Huni					
Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum					
<b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga yang Tidak Dapat Direncanakan</b>					
<b>Dinas sosial</b>					
Bantuan Sosial Kepada Masyarakat					

**Rencana Anggaran Program Sustainable Development Goal (SDGs)  
Tahun 2019**

URAIAN	JUMLAH (Rp)
<b>Belanja Hibah</b>	68.409.309.100,00
Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	68.409.309.100,00
<b>Dinas Pendidikan</b>	
<b>Program Pendidikan anak Usia Dini ( BOP PAUD)</b>	42.144.000.000,00
<b>Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PGG)</b>	19.774.784.200,00
Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) untuk SD/MI	9.556.872.200,00
Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) untuk SMP/ MTs	10.217.912.000,00
<b>Program Penuntasan Buta Aksara Pendidikan Keaksaraan Dasar</b>	6.490.524.900,00
<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat</b>	
<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga</b>	
<b>Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Pada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	
<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	146.836.198.000,00
<b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau keluarga</b>	146.836.198.000,00
<b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau keluarga yang Direncanakan</b>	140.747.808.000,00
<b>Dinas Kesehatan</b>	
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Non Kuota (PBID)	31.257.468.000,00
<b>Dinas Pendidikan</b>	
Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Swasta (BPPDGS)	15.790.740.000,00
Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)	
Sekolah Dasar (SD) Swasta	
MADIN PAKET A	
MADIN PAKET B	
SMP Swasta	
MADIN ULA	
SALAFIYAH WUSTHO	
Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) SMA/SMK/MA Negeri/Swasta	1.299.600.000,00
SMA NEGERI	

SMA SWASTA	
SMK NEGERI	
SMK SWASTA	
MA NEGERI	
MA SWASTA	
<b>Peningkatan Sumberdaya Manusia melalui Beasiswa S1/D4/D3</b>	92.400.000.000,00
<b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga yang Tidak Dapat Direncanakan</b>	6.088.390.000,00
<b>Dinas Sosial</b>	
Bantuan Sosial Pada Masyarakat	6.088.390.000,00







<p>1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.</p>	1.4.1	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.		Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Operasional (SOP) dalam rangka melaksanakan urusan administrasi pemerintahan umum	100%	100%	100%	100%	Bagian Umum		
	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.		Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan (SPM TAHUN 2016) (%)	100	100	100	100%	dinas kesehatan	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan
	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.		Persentase Anak Usia 0-59 Bulan Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Dengan Standart (SPM TAHUN 2016) (%)	100	100	100	100%	dinas kesehatan	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase Anak Usia 0-59 Bulan Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Dengan Standart
	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.		Persentase pemakaian kontrasepsi	76,29	76,29	76,29	76,29%	DPPKB	Program Keluarga Berencana	
	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.		Jumlah kelompok HIPPAM Mandiri	154	177	200	248 kelompok	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman	Program pengembangan kinerja pengelolaan air	

								dan Cipta Karya	minum/bersih	
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	a. Jumlah KK dengan air bersih (KK)	393,808	411,942	430,142	466,542	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Program pengembangan konerja pengelolaan air minum/bersih		
		b. Jumlah KK pelayanan jamban keluarga (KK)	392	1,713	1,713	323,447		Program pengembangan konerja pengelolaan air minum/bersih		
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Luasan kawasan kumuh	40	30	20	0 ha	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	program penanganan kawasan kumuh dan kawasan tertentu	pembangunan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan tertentu	
rehabilitasi rumah tidak layak huni										
pembangunan rusunawa										
monitoring, evaluasi dan pelaporan (										

										P2KKP )
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.		1. Nilai APM SD/MI/ SDLB	100	100	100	100	Dinas Pendidikan	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.		2. APM SMP/SMPLB/ MTs	87	90	94	100	Dinas Pendidikan	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat.		2. APM SMA/SMK/MA	62	70	80	100	Dinas Pendidikan		
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.		Persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 thn	95	97	97	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Penerbitan Akta-Akta Pencatatan Sipil
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.		Persentase Rumah tangga yang mendapatkan akses Listrik	90	90	95	100%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	koordinasi pengembangan ketenagalistrikan
pengembangan dan pemeliharaan kelistrikan										
pengembangan energi terbarukan/ alternatif										

	1.4.2	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.		Persentase Penyelesaian kasus tanah negara	100	100	100	100%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		Korban Bencana Alam (orang)	semua korban bencana alam tertangani	Dinas Sosial					
	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	2. Persentase penanganan korban bencana	Persentase Daerah bencana yang telah direhabilitasi konstruksi				29%	BPBD	Program Penanganan Pasca Bencana	a. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Korban Bencana Alam
											b. Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Korban Bencana Alam
	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.		Jumlah lansia miskin yang mendapatkan santunan uang dan makanan per tahun (orang)	4,778	4,778	4,778	seluruh lansia miskin mendapatkan santunan	Dinas Sosial		



termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.										
1.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.	1.b.1	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.	Jumlah unit usaha ekonomi (Kopwan dan LKMM) kaum perempuan	Persentase pertumbuhan KUBE dan pengembangan KUBE	100%	100%	100%	100%	Dinas Koperasi dan UM			
			2. Jumlah koperasi sehat	Jumlah koperasi yang berhasil dibina dan difasilitasi bantuan permodalan, pelatihan dan peralatan	250	250	250	1.500				

Keterangan: Indikator Sesuai : Ungu Tua

Indikator Senafas : Ungu Muda

Indikator Tidak Sesuai : Putih